

DOI: 10.59330/jai.v2i2.43



JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

# Pengujian Moderasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kepada Kinerja Pemerintah Daerah

Noorsy Irfanio Romadhan<sup>1</sup> | Hafiez Sofyani<sup>1\*</sup> | Adli Zuliansyah Putra<sup>2</sup>**AFILIASI:**<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia<sup>2</sup>Program Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia**\*KORRESPONDENSI:**

hafiez.sofyani@umy.ac.id.

**HISTORI ARTIKEL****Diterima:**

15 Mei 2024

**Direvisi:**

25 Juni 2024

**Disetujui:**

31 Juli 2024

**Abstrak:**

**Latar Belakang:** Kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Namun demikian, kinerja pemerintah daerah setelah otonomi daerah menunjukkan hasil yang kurang baik.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah dengan sistem informasi akuntansi sebagai variabel moderasi.

**Metode Penelitian:** Pemilihan sampel yang diteliti didasarkan pada metode *purposive sampling*. Sebanyak 160 dosen tetap perguruan tinggi di Yogyakarta dilibatkan sebagai responden dengan cara mengisi kuesioner secara langsung.

**Hasil Penelitian:** Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun demikian sistem informasi akuntansi tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai determinan kinerja pemerintah daerah menggunakan sudut pandang teori agensi dan *stewardship*.

**Kata kunci:** Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sistem Pengendalian Internal; Sistem Informasi Akuntansi; Kinerja Pemerintah Daerah

SITASI: Romadhan, N. I., Sofyani, H., & Putra, A.Z. (2024). Pengujian Moderasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kepada Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(2), 104-118.

## Pendahuluan

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara kontinyu yang pada setiap tahapnya mampu memberikan perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya reformasi bisa mewujudkan organisasi yang baik, bersih, tertata, tanpa adanya kolusi dan nepotisme (Zulkarnain & Ningrum, 2020).

Reformasi membentuk sistem pemerintahan yang baru, yang disebut dengan otonomi daerah. Dimana daerah diamanahkan untuk mengatur serta mengurus sendiri daerahnya (Maulana, 2019). Dengan adanya sistem desentralisasi dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah didalam menciptakan daerah dengan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mengatur dan mengurus keperluan rakyat setempat di mana disesuaikan dengan kondisi dan potensi pada wilayahnya (Sunardi dkk., 2019).

Menurut Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2019 pelayanan pada Pemerintah Daerah (PEMDA) yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama mengenai perizinan dan pendidikan. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan untuk urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pemerintahan daerah. Pemerintah mendapatkan tugas dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Administrasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan banyak instansi mampu menimbulkan gejala yang dapat meningkat berkaitan dengan dengan menyelenggaraan pemerintah daerah (Andani, dkk., 2019).

Besarnya anggapan rakyat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menjadikan kinerja pemerintah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan rakyat yang belum merasakan kinerja pemerintah secara optimal (Sutrisna dkk., 2021). Kesuksesan kinerja pemerintah bisa dinilai dari Pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Masyarakat secara umum memberikan penilaian dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur sebagai hal yang pokok pada bidang ekonomi. Pembangunan tidak hanya memiliki arti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan pada bidang ekonomi, tetapi meliputi juga reorganisasi dan pemutakhiran seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial didalam mensejahterakan masyarakat secara umum (Sutrisna dkk., 2021).

Menurut Mokodompit dkk. (2014), kinerja merupakan suatu gambaran untuk melihat mengenai tingkat kesuksesan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi, sasaran yang tertulis pada perencanaan strategi dari suatu organisasi. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika dilihat dari kemampuan dalam mencapai hasil yang dilakukan secara nyata dan maksimal (Sutrisna dkk., 2021). Kinerja pemerintah dapat dalam bentuk seperti pelayan publik, resapan anggaran, capaian *output*, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Muslih dkk., 2019). Sedangkan menurut Novitasari dkk. (2020) kinerja menggambarkan tentang terdapatnya tingkatan dalam pencapaian dari adanya sistem pelaksanaan yang berkaitan dengan proses, program, kebijaksanaan, rencana, dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan, visi, misi dan juga sasaran didalam organisasi yang tertulis pada rumusan yang didalamnya terdapat skema strategis pada suatu organisasi.

Indikator yang dapat digunakan dalam melihat dan menilai kinerja dari pemerintah daerah dapat menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang dinilai berdasarkan skor kinerjanya, dari 475 kabupaten/kota yang telah menyampaikan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2015, sebanyak 93,8% pemerintah daerah yang telah dinilai kinerjanya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan nilai di atas 2,0 yang memiliki arti tinggi dan sangat tinggi. Penggunaan data tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan selama ini sudah memiliki katogeri baik (Ahyaruddin & Amrillah, 2018). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, data kinerja pemerintah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan juga terus mengalami peningkatan. Hal tersebut memiliki dasar bahwa masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Yuliani & Agustini, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa pada tahun 2018 kinerja pemkab Bantul masih kurang baik dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada masing-masing SKPD masih mendapatkan rating yang kurang

baik. Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang signifikan, akan tetapi hal tersebut belum termasuk optimal jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

Hal tersebut terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu faktor penyebabnya ialah penyerapan anggaran di Kabupaten Bantul yang masih dirasa kurang maksimal. Data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul pada tahun 2017 menunjukkan adanya SILPA 2 Milyar lebih dengan persentase penyerapan anggaran 76,21%. Anggaran yang dianggarkan pada tahun 2017 yaitu sejumlah 11.670.087.000 akan tetapi yang terealisasi hanya 8.546.593.450. Hal ini sangat dianggap masih kurang maksimal pada penyerapan anggaran, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan dalam pemerintahannya.

Sistem informasi akuntansi dapat digunakan sebagai faktor penunjang dalam peningkatan kinerja. Menurut Thompson dkk. (1991) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Meningkatnya kebutuhan informasi tersebut, maka pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat bersaing. Arza dkk. (2021) berpendapat bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dalam konteks informasi dan teknologi (IT) berfungsi sebagai alat yang diciptakan untuk mendukung pengelolaan dan pengendalian aspek keuangan ekonomi daerah. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mendukung aktivitas rutin pada instansi pemerintah dan memenuhi informasi keuangan yang merupakan suatu kewajiban kepada negara (Chairina & Wehartaty, 2019).

Sutrisna dkk. (2021) mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi digunakan sebagai peran moderasi karena sistem informasi yang kuat mampu melahirkan peningkatan yang bersaing ditengah kompetisi yang saat ini semakin tinggi. Zaman dimana kemajuan dan perkembangan teknologi sudah semakin baik, instansi pemerintah sudah tidak lagi menggunakan sistem yang kuno, namun berpindah menggunakan sistem yang lebih modern. Adapun kendala yang dirasakan ialah berkaitan dengan *hardware*, *software* yang digunakan dalam pembaharuan data, kondisi sumber daya manusia, dan kendala ini dapat menjadikan penggunaan teknologi informasi menjadi tidak maksimal. Sistem informasi akuntansi dapat berperan dalam memoderasi hubungan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur terkait akuntansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dan optimal. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutrisna dkk. (2021) dengan mengganti variabel komitmen organisasi menjadi sistem pengendalian internal sebagai variabel independent dan mengganti penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi kinerja sebagai variabel dependen. Penggunaan variabel sistem pengendalian internal didasari oleh fenomena pengelolaan izin dan pajak reklame yang belum tertib, dan pengelolaan piutang daerah yang belum memadai di Kabupaten Bantul dan penggunaan kinerja menjadi variabel dependen agar lebih spesifik pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna dkk. (2021) dilakukan di Kabupaten Gianyar dengan sampel sebanyak 40 responden, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan sampel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terletak di Kabupaten Bantul.

## Teori Agensi

Menurut Sumaryati dkk. (2020) teori agensi dijabarkan sebagai hubungan perjanjian antara manager dan pemilik perusahaan. Di dalam teori ini biasa digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pemilik dan pemerintah sebagai manager. Dimana pemerintah sebagai agent yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyediakan akuntabilitas, presentasi, pelaporan, dan pengungkapan dari segala aktivitas, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah

kepada masyarakat. Dimana masyarakat disini bertindak sebagai pihak yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugas akuntabilitas.

Teori agensi melihat implementasi antara principals dan agent memiliki kebutuhan yang sangat berbeda, yang menghasilkan perselisihan mengenai kepentingan atau masalah agensi. Untuk mengurangi masalah ini, dibutuhkan pengawasan apa yang dilakukan *principal* kepada *agent*. Disinilah laporan keuangan menjadi tindakan preventif yang digunakan untuk memantau jika terjadi *agency cost* (Shintia & Erawati, 2017).

Teori ini bisa dijadikan penjelasan antara agency dan praktik finansial pada organisasi sektor public yang memiliki desain berbasis agency theory. Pada laporan keuangan, pemerintah merupakan agent yang memiliki tugas untuk membuka informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dan masyarakat berperan sebagai principal yang bertugas untuk mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan entah itu tentang politik, sosial dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan wakil atau yang biasa disebut dengan dewan perwakilan rakyat. Pemerintah yang demokratis pada teori ini di jelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dan setiap pengguna laporan keuangan (Sumaryati dkk., 2020).

### Stewardship Theory

Hubungan antara teori ini dengan sektor publik adalah teori ini dapat menjelaskan hubungan antara principal dan steward. Menurut Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa teori ini menjabarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih berfokus pada keinginan dari organisasi. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal yang berada di tangan masyarakat dan steward yang berada pada pemerintah. Hubungan ini diciptakan karena sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran (Awwaliyah dkk., 2019). Pemerintah sebagai steward dikarenakan pemerintah memiliki lebih banyak informasi, terutama pada bidang finansial sehingga diharapkan mampu memberikan transparansi kepada masyarakat (Awwaliyah, dkk., 2019).

Berdasarkan teori stewardship, dalam situasi konflik kepentingan antara steward dan principal, steward akan berusaha untuk melakukan kerja sama daripada berbeda pendapat terhadap principal (Yaya & Suprobo, 2019). Logika pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan bersama steward harus berperilaku sesuai dengan harapan dari principal. Teori stewardship memberikan penjelasan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Yaya & Suprobo, 2019).

Pemerintah akan melakukan usaha yang maksimal untuk meraih tujuan dari pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tujuan ini tercapai oleh pemerintah, masyarakat sebagai principal akan puas dengan prestasi pemerintah (Awwaliyah dkk., 2019).

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja

Berdasarkan *stewardship theory* yang telah dibahas dikaitkan dengan perspektif sistem pengendalian internal, memandang bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai badan yang mengelola sumber daya atau dalam hal ini pemerintah menjadi steward dan rakyat sebagai principal yang berkedudukan sebagai pemilik sumber daya (Jatmiko, 2020). Dalam konteks organisasi sektor publik pemerintah memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada publik dan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada publik. Sehingga teori ini dapat diimplementasikan pada kasus organisasi sektor publik atau pemerintahan (Jatmiko, 2020). Sesuai dengan teori *stewardship* tersebut, pemerintah yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020), Haris dkk. (2022), Putri dan Endiana (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, semakin efektif sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah yang diterapkan maka kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik juga. Maka pengembangan hipotesisnya sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja**

Teori agensi menjelaskan secara singkat bagaimana hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka pemerintah memiliki peran sebagai agent yang diberikan kewenangan oleh masyarakat sebagai principal yang diharapkan mampu bekerja menggunakan kompetensi sumber daya manusia pada setiap karyawan terkhusus pada bagian keuangan dengan maksimal. (Philadelphiah dkk., 2020). Dimana, kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan pada semua bagian dari pemerintahan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan akuntabilitas, presentasi, dan pengungkapan akan kegiatan yang merupakan tanggung jawab mereka kepada principal (Sumaryati dkk., 2020). Sehingga diharapkan dengan baiknya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah dapat meningkatkan kinerja.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja (Tarjo, 2020; Cholishofi, dkk., 2022; Katamang, dkk., 2018; Putri & Syarief 2021; Ramadhania & Novianty, 2020). Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan kinerja. Maka pengembangan hipotesisnya sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja yang Dimoderasi Oleh Sistem Informasi Akuntansi**

Penelitian yang dilakukan oleh Malini dan Herawati (2021) menyatakan bahwa dengan dibuatnya software akuntansi, pegawai yang melakukan tugas seperti pembukuan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan pada suatu perusahaan memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja pegawai ketika diimplementasikan penggunaan software akuntansi dalam pekerjaan karyawan (Tambun & Pratiwi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Pratiwi (2022) menghasilkan jika software akuntansi memiliki peran sebagai aplikasi yang memiliki informasi akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan seperti manipulasi data yang dapat disebabkan oleh rendahnya pengendalian internal. Sehingga pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan akan lebih tinggi ketika sistem informasi akuntansinya juga baik. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, pemerintah dapat meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang didukung oleh sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, pengembangan hipotesisnya sebagai berikut:

H<sub>3a</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja yang dimoderasi oleh sistem informasi akuntansi.

H<sub>3b</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja yang dimoderasi oleh sistem informasi akuntansi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di mana dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 28 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bantul. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert 1-5 yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ataupun kelompok orang tentang kejadian atau fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Dalam pengisian kuesioner, responden diminta untuk memberikan respon di mana nilai 1 untuk respon “Sangat Tidak Setuju”, dan 5 untuk respon “Sangat Setuju” atas pernyataan yang disajikan di dalam kuesioner.

Dalam penentuan kriteria responden penelitian, ditetapkan bahwa responde harus memenuhi beberapa kriteria yaitu (1) Responden merupakan pegawai aktif; dan (2) Memiliki jabatan sebagai kepala dinas, bendahara ataupun staff pembantu dengan pengalaman bekerja lebih atau sama dengan 2 tahun. Kuesioner disebarakan dalam rentang waktu 14 November 2023 hingga 3 Desember 2023 secara langsung mendatangi OPD, setelah mendapatkan izin dari instansi.

Penelitian ini menggunakan variabel pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen. Adapun sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderasi, dan variabel kinerja pegawai pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Tabel 1 memberikan informasi mengenai definisi operasional dari masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya, dalam mengembangkan kuesioner, variabel pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan indikator yang digunakan di dalam penelitian Rahmawati (2022). Adapun variabel kinerja diukur menggunakan kuesioner yang mengadaptasi dari penelitian Putri (2014) yang berisikan 12 item pernyataan, dan untuk variabel sistem informasi akuntansi mengadaptasi dari penelitian Zulkarnain (2009) yang terdiri dari 7 item pernyataan.

**Tabel 1** Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Pengendalian Internal	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinu oleh pimpinan dan seluruh anggota untuk memberikan keyakinan yang cukup atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan pragmatis, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Philadelphiah dkk., 2020).	Pengendalian Lingkungan Penilaian Risiko Manajemen Sistem Komunikasi dan Informasi Aktivitas Pengendalian Pemantauan Pengendalian Lingkungan	Rahmawati (2022)
Kompetensi Sumber Daya Manusia	kemampuan dasar dan kualitas kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Zubaidi dkk., 2019).	Pengetahuan Keterampilan Sikap Perilaku	Su dkk. (2022)

**Tabel 1** Operasionalisasi Variabel Penelitian (Lanjutan)

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Sistem Informasi Akuntansi	implementasi aplikasi berbasis keuangan yang secara integral digunakan untuk membantu proses pemenuhan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan (Chairina & Wehartaty, 2019; Suprihatin & Ananthy, 2019)	Kepatuhan Perundang-undangan Akurasi Efisien Relevansi	Zulkarnain (2009)
Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah	Tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan (Capah, 2020)	<i>Value for Money</i> Efisiensi <i>Good Governance</i> Perilaku proaktif	Putri (2014)

Dari 114 kuesioner yang disebarkan, hanya 90 kuesioner (78,9%) yang dikembalikan dan dapat dianalisis. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa responde didominasi oleh perempuan (57,58%) dan memiliki pendidikan terakhir S1 (66,67%). Selanjutnya berdasarkan pengelompokan usia dan lama bekerja, menunjukkan bahwa proporsi responden tidak terdapat dominasi dari salah satu kelompok.

**Tabel 2** Distribusi Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	%
<i>Jenis Kelamin</i>		
Laki-laki	38	42,22
Perempuan	52	57,58
Jumlah Responden	90	100
<i>Usia</i>		
≤ 35 Tahun	50	55,56
> 35 Tahun	40	44,44
Jumlah Responden	90	100
<i>Lama Bekerja</i>		
≤ 5 Tahun	47	52,22
> 5 Tahun	44	47,78
Jumlah Responden	90	100
<i>Pendidikan Terakhir</i>		
Diploma	22	24,44
S1	60	66,67
S2	8	8,89
Jumlah Responden	90	100

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan melakukan evaluasi terhadap *outer model* (uji validitas dan reliabilitas) dan *inner model* (uji hipotesis). Selain itu juga dilakukan pengujian *common method variance* (CMV) untuk memastikan bahwa tidak terdapat bias oleh responden saat mengisi item kuesioner, beserta analisis statistik deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

### Common Method Variance (CMV)

Menurut Podsakoff & Organ (1986), persyaratan suatu data tidak terkena bias metode umum/CMV, jika nilai satu factor laten menjelaskan sebagian besar varian yang dijelaskan yaitu dengan nilai kurang dari 50%. Pengujian CMV pada penelitian ini menunjukkan angka 41,831% sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena permasalahan CMV.

### Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai kisaran teoritis antara 9-45 dengan mean teoritis sebesar 27. Berdasarkan jawaban responden kisaran actual sebesar 23-45 dengan mean actual sebesar 34,07. Hasil uji ini menunjukkan bahwa mean actual lebih besar dari mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kompetensi sumber daya manusia yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 4,821 menyatakan bahwa data kurang bervariasi karena nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai kisaran teoritis antara 7-35 dengan mean teoritis sebesar 21. Berdasarkan jawaban responden kisaran actual yaitu 20-40 dengan mean actual sebesar 30,37. Hasil uji menunjukkan jika mean actual lebih besar dari mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem pengendalian internal yang terjadi di Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 4,317 yang menyatakan bahwa data kurang bervariasi karena nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean.

Selain itu, berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki nilai kisaran teoritis antara 10-50 dengan mean teoritis sebesar 30. Berdasarkan jawaban responden kisaran actual yaitu 24-50 dengan mean sebesar 40,55. Hasil uji menunjukkan jika mean actual lebih besar daripada mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja pemerintah daerah yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul cukup tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 5,708 yang menyatakan bahwa data kurang bervariasi karena nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean.

Selanjutnya, Tabel 3 juga menunjukkan sistem informasi akuntansi memiliki nilai kisaran teoritis antara 7-35 dengan nilai mean teoritis sebesar 21. Berdasarkan jawaban responden kisaran actual yaitu 11-35 dengan mean actual sebesar 28,84. Hasil uji menunjukkan jika mean actual lebih besar dari mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem informasi akuntansi yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 4,249 yang menyatakan bahwa data kurang bervariasi karena nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean.

**Tabel 3** Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Aktual			Kisaran Teoritis			Std. Deviation
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	91	23	45	34,07	9	45	27	4,821
Sistem Pengendalian Internal	91	20	40	30,37	7	35	21	4,317
Kinerja Pemerintah Daerah	91	24	50	40,55	10	50	30	5,708
Sistem Informasi Akuntansi	91	11	35	28,84	7	35	21	4,249

### Uji Outer Model

Evaluasi *outer model* PLS-SEM dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil pengujian validitas (konvergen dan diskriminan) serta reliabilitasnya. Sebuah instrument alat ukur memiliki validitas konvergen yang baik jika item pertanyaan yang terkait dengan setiap variabel laten mampu dipahami oleh responden sama



dengan yang dimaksudkan oleh perancang item pertanyaan (Kock, 2014). Validitas konvergen terpenuhi saat setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0,5, dengan nilai loading untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2012).

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner memiliki nilai *outer loadings* lebih besar daripada 0,70 dan nilai AVE lebih besar dari 0,50. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen.

**Tabel 4** Hasil Uji Validitas Konvergen dan Diskriminan

Variabel	Kode	Outer Loadings
<b>Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) – AVE (0,655)</b>		
	KSDM5	0,806
	KSDM6	0,754
	KSDM7	0,834
	KSDM8	0,818
	KSDM9	0,832
<b>Sistem Pengendalian Internal (SPI) – AVE (0,631)</b>		
	SPI1	0,800
	SPI5	0,824
	SPI6	0,747
	SPI7	0,794
	SPI8	0,805
<b>Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) – AVE (0,645)</b>		
	KPD1	0,796
	KPD2	0,872
	KPD3	0,823
	KPD4	0,793
	KPD5	0,794
	KPD7	0,746
	KPD8	0,875
	KPD9	0,775
	KPD10	0,745
<b>Sistem Informasi Akuntansi (SIA) – AVE (0,719)</b>		
	SIA1	0,801
	SIA2	0,858
	SIA3	0,888
	SIA4	0,865
	SIA5	0,884
	SIA6	0,782
	SIA7	0,852

Selanjutnya, Tabel 5 menunjukkan hasil uji validitas diskriminan *fornell-larcker* dengan cara mengevaluasi apakah nilai akar AVE dirinya sendiri memiliki nilai yang paling besar untuk mengukur dirinya sendiri (ditandai dengan fonta tebal) (Ghozali & Latan, 2015). Berdasarkan pengujian validitas diskriminan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kuesioner telah memenuhi validitas diskriminannya.

**Tabel 5** Uji Fornell-Lacker

	KPD	KSDM	SIA	SPI
KPD	<b>0,803</b>			
KSDM	0,541	<b>0,809</b>		
SIA	0,737	0,422	<b>0,848</b>	
SPI	0,582	0,959	0,415	<b>0,794</b>

Catatan: KPD: Kinerja Pemerintah Daerah; KSDM: Kompetensi Sumber Daya Manusia; SIA: Sistem Informasi Akuntansi; SPI: Sistem Pengendalian Internal

Selanjutnya pengujian reliabilitas dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk semua konstruk pada penelitian. Tabel 6 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk reliabel (Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel 6** Hasi Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite Reliability
KSDM	0,868	0,874
SPI	0,855	0,870
KPD	0,931	0,937
SIA	0,935	0,939

Catatan: KSDM: Kompetensi Sumber Daya Manusia; SPI: Sistem Pengendalian Internal; KPD: Kinerja Pemerintah Daerah; SIA: Sistem Informasi Akuntansi

### Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, didapatkan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,640 yang artinya variabel KSDM, SPI, dan SIA mampu mempengaruhi variabel KPD sebesar 64% dan 36% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, Tabel 7 juga menunjukkan bahwa  $H_1$  dan  $H_2$  terdukung, namun demikian  $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$  tidak terdukung berdasarkan evaluasi nilai *t-statistic*, *p-value*, dan arah dari nilai *original sampel*.

**Tabel 7** Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Original Sample (O)	t-statistic	p-value	Keterangan
KSDM -> KPD	H1 (+)	0.505	1.987	0.047	Terdukung
SPI ->KPD	H2 (+)	0.833	3.084	0.002	Terdukung
SPI*SIA -> KPD	H3a (+)	0.339	1.437	0.151	Tidak Terdukung
KSDM*SIA -> KPD	H3b (+)	-0.347	1.578	0.115	Tidak Terdukung

Catatan: KSDM: Kompetensi Sumber Daya Manusia; SPI: Sistem Pengendalian Internal; KPD: Kinerja Pemerintah Daerah; SIA: Sistem Informasi Akuntansi

### Pembahasan

#### Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul.

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dengan demikian maka  $H_1$  Diterima. Hipotesis pertama diterima artinya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusianya, OPD di Kabupaten Bantul meningkatkan kompetensi SDMnya dengan mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang bersifat konservatif, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul juga memastikan bahwa setiap pegawai pada OPD memiliki pemahaman yang baik akan tugas pokok, fungsi, dan deskripsi pekerjaan yang ada. OPD di Kabupaten Bantul juga mengedepankan pada setiap pegawai untuk memahami dengan baik Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 yang berisikan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengujian dapat membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah maka hal ini sesuai dengan teori Agency Theory yang memandang bahwa organisasi pemerintah daerah (OPD) memiliki peran sebagai agent yang diberikan kewenangan oleh masyarakat yang berkedudukan sebagai principal. Di mana masyarakat mengharapkan setiap pegawai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan akuntabilitas, presentasi, dan pengungkapan kegiatan yang jelas dan transparan.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2020), Cholishshofi dkk. (2022), Katamang dkk. (2018), Putri dan Syarief (2021), dan Ramadhania dan Novianty (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik memberikan bukti bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Bantul mampu meningkatkan kinerja dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Bantul. Dengan demikian semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh OPD di Kabupaten Bantul maka akan membuat kinerja OPD semakin tinggi.

### **Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul.**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) penelitian ini menyatakan bahwa system pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dengan demikian maka  $H_2$  Diterima. Hipotesis kedua diterima artinya OPD di Kabupaten Bantul sudah melakukan tugas dan fungsi pada setiap posisi di instansi yang telah ditetapkan oleh standar kompetensinya, OPD di Kabupaten Bantul telah mencerminkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab bagi para pegawai, OPD di Kabupaten Bantul telah mengambil Tindakan tegas terhadap pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku, OPD di Kabupaten Bantul telah melakukan review dan evaluasi terhadap temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan memerlukan perbaikan, OPD di Kabupaten Bantul sudah memberikan wewenang kepada pegawai yang sesuai dengan Tingkat tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan dari instansi pemerintah, OPD di Kabupaten Bantul telah melakukan analisis risiko secara komprehensif terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap system akuntansi sehingga dengan hal ini OPD di Kabupaten Bantul mampu meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari pengujian dapat membuktikan bahwa system pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah maka hal ini sesuai dengan teori *stewardship* bahwa system pengendalian internal memandang jika pemerintah memiliki fungsi sebagai badan yang mengelola sumber daya atau dalam hal ini pemerintah berperan menjadi *steward* dan rakyat menjadi *principal* yang berkedudukan sebagai pemilik sumber daya. Dalam konteks organisasi sektor public pemerintah memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada public dan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada public.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2020), Haris dkk. (2022), dan Putri dan Endiana (2020) yang menunjukkan bahwa system pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian dengan adanya system pengendalian internal yang baik seperti Tindakan tegas terhadap pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku serta memberikan wewenang kepada pegawai sesuai dengan Tingkat tanggung jawabnya mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi system pengendalian internal di pemerintah daerah maka kinerjanya akan semakin baik.

### **Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul dengan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Moderasi**

Hipotesis  $H_{3a}$  penelitian ini menyatakan bahwa system informasi akuntansi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara system pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul maka dengan demikian  $H_{3a}$  ditolak. Hal ini memberikan arti bahwa kinerja pemerintah daerah belum mampu mencerminkan informasi asset pemerintah daerah secara akurat, pemerintah daerah Kabupaten Bantul belum mampu untuk menghemat waktu untuk pengumpulan data, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum mampu menyediakan informasi yang mempermudah dalam pengambilan Keputusan transaksi, Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul belum mampu mengatasi kelemahan manusia dalam pemrosesan data, Pemerintah di Kabupaten Bantul belum mampu untuk mempercepat proses laporan keuangan, Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul belum mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten Bantul belum mampu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil pengujian dapat membuktikan bahwa system informasi akuntansi tidak mampu memoderasi hubungan antara system pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan teori *Agency* bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, OPD dapat menggunakan sistem informasi akuntansi untuk membantu dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan teori ini sejalan dengan OPD di Kabupaten Bantul yang sudah menerapkan system informasi akuntansi yang baik sehingga mampu memicu peningkatan kinerja pemerintah yang lebih baik. Fakta pada penelitian ini mengungkap bahwa banyak pegawai di organisasi pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk menggunakan system informasi akuntansi yang ada. Di mana system informasi akuntansi seharusnya mampu untuk memproses pembuatan laporan keuangan dan mengatasi kelemahan manusia dalam pemrosesan data. Masih belum terimplementasikannya system informasi akuntansi yang ada membuat organisasi pemerintah daerah sulit untuk menyediakan informasi yang mempermudah dalam pengambilan Keputusan transaksi. Sehingga memungkinkan hal ini lah yang menjadi system informasi akuntansi tidak dapat mendukung system pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutrisna dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memoderasi hubungan antara system pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul dapat meningkat dengan memanfaatkan sistem pengendalian internal yang telah terimplementasi dengan cukup baik meskipun tidak didukung oleh sistem informasi akuntansi yang ada. Tetapi, sistem pengendalian internal akan menjadi lebih agresif jika dapat didukung oleh sistem informasi akuntansi yang baik.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Moderasi**

Hipotesis  $H_{3b}$  penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul maka dengan demikian  $H_{3b}$  ditolak. Artinya kinerja pemerintah daerah belum mampu mencerminkan informasi asset pemerintah daerah secara akurat, pemerintah daerah Kabupaten Bantul belum mampu untuk menghemat waktu untuk pengumpulan data, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum mampu menyediakan informasi yang mempermudah dalam pengambilan Keputusan transaksi, Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul belum mampu mengatasi kelemahan manusia dalam pemrosesan data, Pemerintah di Kabupaten Bantul belum mampu untuk mempercepat proses laporan keuangan, Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul belum mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten Bantul belum mampu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai yang dimoderasi oleh sistem informasi akuntansi di OPD Kabupaten Bantul. Berdasarkan pengujian hipotesis, ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai OPD di Kabupaten Bantul. Meski demikian sistem informasi akuntansi tidak dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa OPD Bantul perlu memberikan perhatian terhadap kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, agar kinerja pegawai yang

diharapkan tercapai. Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti diperlukannya cakupan wilayah yang lebih luas dengan melibatkan kabupaten lainnya.

## Daftar Pustaka

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471-486.
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111-130.
- Arza, O., Syafitri, Y., & Meyla, D. N. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519-542.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research—Vol*, 1(1), 10-21580.
- Capah, A. S. (2020). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Perusahaan Jasa Di Kabupaten Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 1-14.
- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKPD kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 31-39.
- Cholisshofi, N. S., & Bahiroh, E. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Pengembangan Karir Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Jawa Barat Dan Banten (BJB) Cabang Rangkasbitung. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 15(1), 31-46.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). Partial Least Squares : Konsep, Teknik Dan Aplikasi Smartpls 2.0 M3 Untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares: Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Smartpls 3.0. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haris, A., Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 34-42.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246.
- Katamang, A. F., Tulus, F., & Palar, N. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58).
- Kock, N. (2014). Advanced mediating effects tests, multi-group analyses, and measurement model assessments in PLS-based SEM. *International Journal of e-Collaboration (ijec)*, 10(1), 1-13.
- Malini, K. T. W., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, dan Human Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 97-109.
- Maulana, A. (2019). Faktor-faktor pembentukan daerah otonomi baru dan dampaknya terhadap keuangan negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 53-67.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0*, 3(1).
- Novitasari, D. R., & Prabowo, T. J. W. (2020). pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2).

- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1).
- Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and prospects. *Journal of management*, 12(4), 531-544.
- Putri, E. S., & Syarif, A. (2021, September). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 12, 1202-1208.
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan (studi kasus pada koperasi di kecamatan payangan). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 179-189.
- Putri, R. M. Y. (2014). Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Universitas Jember.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 346-359.
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020, September). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 807-813.
- Shintia, C. I. A. P., & Erawati, N. M. A. (2017). Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN, 21(2), 2302-8556.
- Sugiyono, P. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting information system, internal control system, human resource competency and quality of local government financial statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795-802.
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governanceterhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Akuntabilitas*, 13(2), 155-166.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242-252.
- Sutrisna, I. P. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, C. G. B. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderasi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 637-664.
- Tambun, S., & Pratiwi, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Dimoderasi oleh Penerapan Software Akuntansi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(2), 117-123.
- Tarjo, T. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja aparatur desa. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 334-340.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. *MIS quarterly*, 125-143.
- Yaya, R., & Suprobo, H. S. (2019). Determinants of weaknesses in internal control of Provincial Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 296-309.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68-76.
- Zulkarnain, R. (2009). Evaluasi sistem informasi akuntansi persediaan dan produksi pada PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Thesis. Universitas Pelita Harapan.

Zulkarnain, Z., & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197-211.